

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara multikultural dimana terdapat keberagaman budaya¹ ini dipengaruhi oleh kondisi alam Indonesia yang luas. Selain itu keberagaman budaya di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah panjang sejarah Indonesia dari masa kerajaan, Kolonial hingga kini. Selain suku asli Indonesia, berbagai bangsa pendatang juga menetap dan akhirnya berkembang membuah sebuah golongan baru dalam struktur lapisan masyarakat, seperti peranakan Eropa, Melayu, India, Arab, hingga Tionghoa. Etnis-etnis ini tumbuh dan berkembang serta berasimilasi dengan masyarakat pribumi. Perkembangan kehidupan etnis-etnis di Indonesia telah menjadi satu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pergantian rezim pemerintah dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa reformasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan kebudayaan etnis-etnis pendatang ini.

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis yang tersebar di seluruh dunia. Ini berarti etnis Tionghoa ada di setiap negara dan salah satunya adalah Indonesia. Sudah diketahui bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari keragaman bangsa Indonesia yang sudah lama ada sebelum kemerdekaan, kehadiran masyarakat Tionghoa di Indonesia seolah sudah menyatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia yang juga keberadaannya mengalami

¹ Penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola-pola perilaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Available at: <https://kbbi.web.id/asimilasi>

konflik horizontal dengan pribumi serta ada pendiskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Perjalanannya yang panjang dan peranannya sebagai bagian etnis yang turut serta dalam kemerdekaan pembangunan Indonesia nampaknya tidak menjadi nilai positif bagi mereka di mata etnis pribumi lainnya di Indonesia, setidaknya dalam beberapa kasus diskriminasi yang pernah terjadi pada masa kolonialisme Belanda hingga yang terkenal saat berlangsungnya pemerintahan orde lama dalam kurun waktu yang cukup lama sebelum lahirnya reformasi pemerintahan tahun 1998.²

Masyarakat Tionghoa tergolong dalam masyarakat minoritas Indonesia, sebenarnya etnis Tionghoa sudah ada pada abad ke-5. Warga Tionghoa melebur menjadi warga setempat yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, walaupun tidak selalu baik. Karena hal tersebut merupakan suatu fakta sejarah yang tak terbantah, bahwa etnis Tionghoa adalah pendatang, terlepas dari kenyataan bahwa kedatangannya terjadi berabad-abad lampau yang diperkirakan sekitar abad ke-5, sehingga keberadaannya bukan lagi hal baru. Fakta sejarah ini tak bisa di hapus dan harus diterima oleh bangsa Indonesia sebagai bagian integral kehidupan orang Tionghoa Indonesia. Etnis Tionghoa harus bisa diterima secara legowo untuk membangun kembali Indonesia, karena mereka sudah merupakan bagian integral bangsa Indonesia.³

² Egie Ferlando dan Ragil Agustono, *Eksistensi Etnis Tionghoa Dalam Bidang Sosial Dan Budaya Di Indonesia tahun 1966-2016*, Jurnal Swarnadwipa, Vol. 2, No. 3. Tahun 2018.

³ *Ibid.*, hlm. 223.

Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok. Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Namun dengan terhentinya imigrasi dari daratan Tiongkok, jumlah totok sudah menurun karena generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi yang dipulau Jawa.⁴

Pada dasarnya praktik diskriminasi telah terjadi pada era kemerdekaan Indonesia. Dimana dalam usaha diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa dilakukan oleh negara Indonesia. Misalnya pada era pemeritahan presiden yang pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Pada awalnya soekarno menyerukan kepada suatu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, agar warga Etnis Tionghoa melakukan suatu integrasi, yaitu mempertahankan identitas Tionghoa sambil tetap menjadi warga Negara Republik Indonesia, namun kepada Lemabaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) Presiden Soekarno mengatakan agar Etnis

⁴ Penulis berpendapat bahwa etnis Tionghoa di negara Indonesia terbagi atas Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok. Tionghoa Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama menetap di Indonesia, sedangkan Tionghoa totok adalah seorang pendatang dan masi berbahasa Tiongho. Leo Suryadiningrat, *Negara dan Etnis Tionghoa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), hlm. 176.

Tionghoa melakukan asimilasi, yang dimana Etnis Tionghoa harus membaaur secara total terhadap kebudayaan Indonesia⁵

Dalam suatu kebijakan yang berkaitan dalam pembatasan adalah tentang agama, kepercayaan, dan adat-istiadat Etnis Tionghoa yang terdapat pada pada Intruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Dalam Intruksi tersebut dijelaskan bahwa seluruh kegiatan upacara agama, kepercayaan, dan kebudayaan Etnis Tionghoa hanya boleh dilakukan didalam lingkungan keluarga dan didalam lingkungan yang tertutup. Agama Konghucu yang sangat banyak dimiliki Etnis Tionghoa, sekarang tidak mendapatkan pengakuan. Walaupun didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 melindungi kebebasan setiap WNI untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Pemerintahan Orde Baru sangat mengkhawatirkan pelestarian cagar budaya leluhur nenek moyang Etnis Tionghoa akan mengganggu proses dari proses asimilasi total yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru pada saat itu, mengasumsikan semua budaya Tionghoa dan agama tradisional Tionghoa dianggap dapat menjembatani masuknya paham komunis dari Tiongkok dan mengekalkan paham komunis yang sudah sangat masuk ke Indonesia pada masa itu⁶

⁵ Penulis berpendapat bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah terjadi sejak masa pemerintahan Orde lama, dimana presiden Ir. Soekarno menyerukan agar etnis Tionghoa melakukan asimilasi melalui Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB). Leo Suryadinata, *Dilema minoritas Tionghoa* (Jakarta : PT. Grafiti Pers, 1984), hlm. 26.

⁶ Oh Husien, *Ambivalensi Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Golongan Etnis Tionghoa: Suatu Tinjauan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967*, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 40 hlm. 49 . Tahun 2015.

Pada masa pemerintahan Gus Dur menghapus segala bentuk diskriminasi budaya dan agama. Dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut instruksi Presiden N. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat.⁷ Sedangkan, pada tanggal 19 Januari 2001 menteri agama republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2001 tentang penetapan hari raya Imlek sebagai hari libur fakultatif dan diteruskan dengan pencabutan larangan penggunaan bahasa Tionghoa baik lisan maupun tulisan, termasuk di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan dari aspek sejarah, Sidoarjo pada awalnya adalah kota bernama Sidokare yang dipimpin oleh seorang patih bernama R. Ng. Djojohardjo, bertempat tinggal di kampung Pucang Anom. Patih ini dibantu oleh seorang wedana yaitu Bagus Ranuwiryo yang berdiam di kampung Panggabahan pada tahun 1851. Pada saat itu Sidokare masih merupakan daerah bagian dari Kabupaten Surabaya.⁸ secara umum, mayoritas penduduk besar yang menetap di Kota Sidoarjo adalah orang Jawa. Pemerintah kolonial membagi masyarakat di Indonesia menjadi tiga lapisan, yaitu kelas atas yang terdiri dari orang-orang kolonial, kelas menengah yang terdiri dari peranakan Eropa, India, Arab, dan Tionghoa, serta kelas bawah yang diisi oleh orang pribumi. Hal tersebut juga berlaku untuk orang Jawa, walaupun suku ini merupakan mayoritas di Kota Sidoarjo, namun pemerintah kolonial Belanda tidak menggolongkan orang-orang Jawa ini sebagai sebuah golongan etnis tersendiri,

⁷ Suhandi, I, *Gus Dur Santri Par Excellence* (Yogyakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 191.

⁸ Tim Penelusuran Sejarah Sidoarjo, *Jejak Sidoarjo: dari Jengala ke Suriname*(Sidoarjo, Ikatan Alumni Pamong praja Sidoarjo, 2006), hlm, 38.

akan tetapi menjadi sebuah kesatuan dengan golongan-golongan yang disebut Inlander dan pribumi.⁹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan. Perumusan merupakan pertanyaan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan pembatasan masalah. Perumusan masalah yang baik bukan saja membantu mengambil keputusan namun sekaligus mengarahkan cara berpikir penulisan Skripsi saya yang berjudul “Dinamika Kebudayaan Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Tahun 1965-2000”. Maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana sejarah kebudayaan etnis Tionghoa di Sidoarjo tahun 1965-2000?
2. Bagaimana hasil kebudayaan etnis Tionghoa di Sidoarjo tahun 1965-2000?
3. Bagaimana kehidupan kebudayaan etnis Tionghoa di Sidoarjo tahun 1965-2000?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai rumusan pada suatu ruang lingkup dalam sebuah progres penelitian dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dapat tercapai. Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk memahami sejarah kebudayaan etnis Tionghoa di Sidoarjo.

⁹Purnawan Basundoro, “Penduduk dan Hubungan Antar Etnis di Kota Surabaya” dalam Jurnal *Paramita* Vol. 22 No, 1, hlm. 2, Tahun 2012.

2. Untuk memahami perkembangan kebudayaan etnis Tionghoa diSidoarjo.
3. Untuk memahami kehidupan kebudayaan etnis Tionghoa di Sidoarjo.

D. Ruang Lingkup

Batasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan yang jelas. Oleh karena itu dalam pengkajian masalah ini penulis membatasi pada "Dinamika Kebudayaan Etnis Tionghoa di Sidoarjo tahun 1965-2000". Pembatasan ini dimaksudkan untuk mempersempit agar penulis lebih khusus dan terarah pada pokok permasalahan. Batasan temporal kajian ini dimulai pada tahun 1965-2000, karena pada tahun 1965 adalah tahun dimana pada masa Orde baru etnis Tionghoa tidak mendapatkan kebebasan oleh pemerintah Orde baru dalam menjalankan kebudayaan. Sedangkan pada tahun 2000, dimana pada era reformasi, etnis Tionghoa mendapatkan kebebasan dalam menjalankan segala jenis kebudayaan seperti perayaan Tahun Baru Imlek, dan pertunjukan Barongsai. Batas Spasial penelitian ini adalah Kota Sidoarjo. Penulis mengangkat penelitian dalam Kota Sidoarjo karena pada tahun ini Kota Sidoarjo terkena dampak atas peraturan pemerintah dari era Orde Baru, dimana etnis Tionghoa tidak diberi kebebasan dalam menjalankan kebudayaan, sedangkan di era reformasi etnis Tionghoa mendapatkan kebebasan dalam menjalankan kebudayaan.

E. Metode Penelitian

Metode dalam ilmu sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara sistematis, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis secara tertulis atau suatu prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen autentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan.¹⁰

1. Heuristik (metode pengumpula data)

Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan memengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Seperti yang dijelaskan, sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan, dan benda. Ketika sumber ini dapat digunakan sekaligus bila memungkinkan. Mengingat sifatnya sistematis, maka tahap-tahap dari metode sejarah tidak dapat ditukar balik atau mendahulukan kritik, interpretasi, ataupun historiografi. Semua jenis tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah masa lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarawan.¹¹

Pertama, sumber tulisan yakni jejak masa lalu yang mengandung informasi dalam bentuk tulisan. Tulisannya dapat berupa informasi primer dan sekunder. Informasi primer biasa dikenal dengan pengetahuan tentang peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktunya sama) dengan ketika peristiwa itu terjadi.

¹⁰ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2009), hlm. 42.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

Sumber primer umumnya berupa arsip, catatan perjalanan, risalah sidang, daftar hadir peserta (sebuah rapat), surat keputusan, dan sebagainya.

2. Verifikasi (kritik sumber)

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk menentukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu verifikasi sebelum digunakan. Dalam penulisan. Dua aspek yang dikritik ialah keautentikan (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah.¹² Penentuan keaslian sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, dikenal dengan kritik internal. Setiap sumber sejarah diperlakukan sama, yakni diseleksi baik segi eksternal maupun internalnya. Tahap penyeleksian harus sistematis, yakni diawali dengan kritik eksternal dan kemudian kritik internal. Jika tahap pertama suatu sumber sejarah tidak memenuhi syarat sebuah sumber sejarah (dari segi keautentikan), tidak perlu dilanjutkan verifikasi tahap selanjutnya.

3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis,

¹² *Ibid.*, hlm. 47.

dipandang sebagai metode-metode utama didalam interpretasi.¹³ dalam proses interpretasi sejarah, seseorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Fakta sejarah memang menghasilkan beberapa sebab yang membantu mencapai hasil hasil dalam berbagai bentuknya. Walaupun suatu sebab seringkali dapat mengantarkan kepada hasil tertentu, tetapi mungkin juga sebab yang sama dapat mengantarkan kepada hasil yang berlawanan dalam lingkungan lain. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data untuk membuktikan peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi jelaslah, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian peneliti akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu. Analisis sejarah dengan pendekatan situasional.¹⁴

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penulisan sejarah, setelah melalui heuristik, kritik sumber, dan interpretasi. Pada tahap akhir inilah penulisan sejarah dilakukan.¹⁵ Pengisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena stiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandanganya terhadap apa yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat dengan kaitanya dengan sikap hidup, pendekatan, atau orientasinya. Oleh karena itu, perbedaan pandangan

¹³ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang,1995), hlm. 100.

¹⁴ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 114-115.

¹⁵ M. Dien madjid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah sebuah pengantar*(Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 230.

terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, pada gilirannya akan menjadi kenyataan yang relative.¹⁶ Bagi penulis sejarah ataupun sejarawan akademis yang menganut *relativisme historis*, yakni pandangan sejarah yang serba relatif, mengedepankan sikap netral dalam pengkajian dan penulisan sejarah merupakan hal yang sulit direalisasikan. Ketika berada di meja kerja, sejarawan pemula yang belum memiliki pengalaman menulis kisah sejarah akan mengalami kebingungan. Memikirkan dari mana mulai menulis suatu kisah masa lalu menjadi masalah yang sangat mengganggu.

Demikian kecenderungan subjektifitas itu selalu mewarnai bentuk-bentuk penulisan sejarah. Hal ini karena secara umum dapat dikatakan bahwa kerangka pengungkapan atau penggambaran atas kenyataan sejarah itu ditentukan oleh penulis sejarah atau sejarawan akademis, sedangkan kejadian sejarah sebagai aktualitas itu juga dipilih dengan dikonstruksi menurut kecenderungan seorang penulis.¹⁷ Pengetahuan sejarah yang objektif itu justru timbul bila terdapat beberapa pendapat antara para sejarawan. Pernyataan mereka yang berbeda mengenai peristiwa sejarah yang sama, belumlah merupakan perbedaan pendapat, sebab peristiwa sejarah bisa dilihat dari berbagai perspektif. Salah satu ciri utama eksplanasi dalam sejarah, adalah urutan-urutan kejadian dari suatu peristiwa. Eksplanasi yang baik ialah ketika peristiwa masa lalu yang di rekonstruksi tampak "hidup" (ibarat sebuah dialog) ditengah kehidupan kita. Dengan kata lain, membaca karya itu maka seseorang akan dibawa ke dalam ruang kehidupan yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 232.

dilakukan itu, ibarat seorang yang sedang menyaksikan tayangan di layar kaca (televisi). Namun hal itu tidak mudah dilakukan, tanpa dilandasi oleh kemampuan analisis sejarawan terutama dalam mengaitkan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, atau sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa.

Pada akhirnya, fakta sejarah seperti itu harus didukung oleh daya imajinasi yang kuat dari sejarawan. Hal ini terkait dengan kemampuan merangkai dan memainkan kata-kata, sehingga terjalin hubungan antara fakta. Apapun hasil dari terjemahannya, namun yang paling penting ialah hal itu dibangun atas dasar sumber sejarahnya. Inilah yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu sastra dalam hal penggunaan imajinasi. Ilmu sastra imajinasinya sangat bersifat abstrak. Sedangkan ilmu sejarah, peristiwa sejarahnya bersifat fakta.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan suatu permasalahan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka sistematika penulisan ini membahas tentang Dinamika Kebudayaan Etnis Tionghoa di Kota Sidoarjo Tahun 1965-2000. Isi dari Bab Pertama adalah pendahuluan yang merupakan gabungan dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab Kedua menjelaskan tentang sejarah Kota Sidoarjo. Bab Ketiga menjelaskan tentang kehidupan kebudayaan pada masa orde baru. Bab Keempat menjelaskan tentang kehidupan kebudayaan pada masa reformasi. Bab Kelima menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran.